

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Partai politik di era reformasi ini memiliki kekuasaan yang sangat besar, sesuatu yang wajar di negara demokrasi. Dengan kewenangannya yang demikian besar itu, seharusnya tugas parpol yang utama adalah mencari putra-putri terbaik untuk menduduki jabatan-jabatan politik dan pejabat-pejabat negara. Dalam prakteknya, kondisi ideal itu belum dilaksanakan dengan baik oleh partai politik. Kredibilitas partai politik yang sangat berkuasa itu juga terus merosot, disebabkan oleh maraknya *money politics* dalam banyak proses politik di lembaga politik dan lemahnya rekrutmen politik yang berkualitas. Dengan kekuasaan yang demikian besar, partai-partai belum menjalankan tugasnya secara maksimal dalam memuaskan rakyat (Mubarok, 2011: 55).

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Pada era modern partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah yang cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara. Dan ia baru ada di negara modern.

Partai politik merupakan salah satu institusi dari pelaksanaan demokrasi modern. Demokrasi modern menginginkan sebuah sistem dimana

yang disebut keterwakilan, baik keterwakilan dalam lembaga-lembaga formal seperti parlemen maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian. Menurut Budiardjo (2008: 405) partai politik memiliki beberapa fungsi seperti : sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik

Selanjutnya Budiardjo (2008: 408) menjelaskan fungsi rekrutmen sebagai salah satu dari bagian fungsi partai politik yang sangat penting. Fungsi rekrutmen berkaitan erat dengan seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas. Karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

Dalam melakukan fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik, mayoritas partai politik hanya melakukan proses perekrutan pada saat mendekati pemilihan saja. Hal ini menyebabkan timbulnya kader-kader instan yang tidak kompeten dalam melakukan tugas-tugasnya ketika kader tersebut menduduki jabatan-jabatan politik. Idealnya sebuah partai politik dalam melakukan perekrutan terhadap anggota, hendaknya dilakukan jauh-jauh hari sebelum mendekati pemilihan. Hal ini akan memberikan waktu kepada partai politik untuk melatih kader-kader partainya dengan baik sehingga kader-kader

yang mengikuti proses kaderisasi tersebut akan menyatu dengan ideologi, visi, misi, dan program kerja partai.

Pada saat ini partai politik dihadapkan dengan berbagai permasalahan menyangkut tentang masalah rekrutmen itu sendiri. Salah satu permasalahan lama yang timbul saat ini seperti misalnya, politisi-politisi yang sering berpindah-pindah partai, atau publik sering menyebutnya sebagai politisi *oportunis* “kutu loncat” maupun munculnya gejolak internal partai pada setiap suksesi pimpinan partai. Fenomena ini menunjukkan masih lemahnya proses rekrutmen partai politik. Lemahnya rekrutmen politik di partai politik merupakan sebuah persoalan yang penting, karena di dalam partai politik akan dilatih calon-calon pemimpin baik lokal maupun nasional yang memiliki mental yang jujur, bersih dan punya visi dan misi yang jelas.

Lebih jauh, partai politik di negeri ini bagaikan teramputasi. Partai politik bagaikan pincang dan lumpuh. Partai politik hampir kehilangan marwahnya sebagai pencetak politisi-politisi unggul dan bermartabat. Sejumlah pengurus partai politik, yang pernah jadi pejabat publik, terjerat kasus korupsi. Fenomena ini disinyalir ada yang salah dalam proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik.

Setiap partai politik memiliki rekrutmen yang berbeda, dimana rekrutmen anggota partai disesuaikan dengan system politik yang dianut partai tersebut (Fadhilah Putra 2003: 19). Dalam kancah dunia perpolitikan Indonesia Partai Keadilan Sejahtera bukanlah partai baru. Kader-kader PKS merupakan kader yang berloyalitas tinggi, setiap pergantian pimpinan partai minim adanya gejolak internal yang mencuat ke public (dalam *Suara Merdeka*

24 Juli 2012). Sebagai partai politik yang sudah lama , sebuah partai harus dapat mencari rekrutmen yang tepat untuk dapat mencetak kader-kader berkualitas yang tidak pragmatis dan oportunistis.

PKS merupakan representasi partai Islam dengan militansi kader dan struktur partai yang kuat dikenal sebagai partai solid, dekat dengan akar rumput dan partai yang indeks korupsinya rendah. Ditengah badai kasus besar yang menimpa PKS ada data yang cukup menarik dari PKS, menurut data ICW, ada 48 calon anggota legislatif 2014-2019 terpilih terindikasi tersangkut perkara korupsi baik ditingkat pusat maupun DPRD dalam rilis tersebut terkait nama-nama anggota dewan terpilih periode 2014-2019 yang tidak terkait kasus korupsi hanya PKS (dalam *Republika Online* ,15 September 2014).

Seorang caleg terpilih yang terindikasi tersangkut korupsi akan sangat berbahaya jika sampai dilantik menduduki kursi parlemen . Mereka bukan hanya wakil rakyat tetapi juga penentu proses kebijakan-kebijakan public ditingkat daerah maupun pusat.

Dalam kehidupan politik Wonogiri, PKS merupakan partai Islam yang unik, mengingat Wonogiri adalah basis massa PDIP dan Golkar, PKS adalah Partai Islam yang mampu bersaing dengan partai besar tersebut. Dari hasil rekapitulasi KPUD Wonogiri perolehan kursi partai politik dalam pemilihan anggota DPRD tahun 2014 Kabupaten Wonogiri PKS memperoleh jumlah kursi 6 kursi dibawah PDIP dengan 13 kursi dan Partai Golkar dengan 10 kursi. Bila dibandingkan dengan pemilu legislatif 2009 PKS tetap bertahan dengan jumlah 6 kursi, hal ini berbeda dengan dua partai besar PDIP dan Partai Golkar, yang mana sebelumnya PDIP memperoleh 19 kursi dan Partai

Golkar memperoleh 15 kursi. Dari fenomena ini Partai Keadilan Sejahtera Wonogiri tidak terpengaruh dengan adanya beberapa kasus besar yang pernah terjadi di PKS.

Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan mempelajari lebih jauh bagaimana rekrutmen politik yang dilakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Wonogiri dalam merekrut calon anggota legeslatif pada pemilu legeslatif 2014. Untuk itulah penulis mencoba mengangkat permasalahan ini kedalam penelitian yang berjudul "Rekrutmen Politik Partai KeadilanSejahtera (*Studi Deskriptif Rekrutmen Calon Anggota Legeslatif DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Wonogiri Pada Pemilu Legislatif 2014*)"

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan terarah dan tepat sasaran, maka permasalahan harus dirumuskan dengan jelas. Berdasarkan judul diatas, maka perumusan masalah penelitian adalah :

1. Bagaimana proses rekrutmen politik calon anggota legeslatif yang dilakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Wonogiri pada pemilu legeslatif 2014 ?
2. Bagaimana jalur rekrutmen politik calon anggota legeslatif yang dilakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Wonogiri pada pemilu legeslatif 2014 ?

3. Bagaimana pola rekrutmen politik calon anggota legeslatif yang dilakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Wonogiri pada pemilu legeslatif 2014 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses rekrutmen politik calon anggota legeslatif yang dilakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Wonogiri pada Pemilu legeslatif 2014.
2. Untuk mengetahui jalur rekrutmen politik calon anggota legeslatif yang dilakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Wonogiri pada pemilu legeslatif 2014.
3. Untuk mengetahui pola rekrutmen politik calon anggota legeslatif yang dilakukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Wonogiri pada pemilu legeslatif 2014.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan pada bidang ilmu politik khususnya mengenai permasalahan rekrutmen politik pada partai politik.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah literatur khususnya di bidang ilmu social politik.

3. Bagi penulis, untuk mengembangkan kemampuan berfikir dan mengasah kemampuan dalam membuat karya ilmiah.
4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan masukan peneliti yang berminat meneliti lebih jauh mengenai rekrutmen politik PKS

#### **E. Pembatasan Masalah**

Untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan hasil uraian yang sistematis diperlukan adanya pembatasan masalah atas ruang lingkup penelitian. Pembatasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian tersebut. Adapun pembatasan masalah yang akan diteliti adalah penelitian hanya dilakukan di DPD (Dewan Pengurus Daerah) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Wonogiri pada Periode 2010-2015 dan penelitian hanya dilakukan untuk mengetahui rekrutmen politik yang meliputi proses, jalur dan pola rekrutmen politik terhadap calon anggota legeslatif Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Wonogiri Pada pemilu legeslatif 2014 di Wonogiri.